



BERLIN MARATHON DI JERMAN

Pemandangan saat dimulainya Berlin Marathon, Berlin, Jerman, Minggu (26/9).

Rakyat Tunisia Tuntut Presiden Saied Mundur

Presiden Kais Saied memecat perdana menteri dan menanggukkan parlemen.

TUNIS(IM) - Ribuan orang menggelar aksi protes di Tunis Senin (27/9) untuk menuntut Presiden Tunisia Kais Saied mundur. Saied telah mengesampingkan sebagian besar konstitusi 2014, dengan memecat perdana menteri, menanggukkan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif.

"Rakyat menginginkan keruntuhan kudeta. Mundur, mundur, mundur," teriak para pengunjuk rasa, dilansir Middle East Eye, Senin (27/9).

Krisis politik telah membahayakan demokrasi yang dimenangkan Tunisia dalam revolusi 2011 yang memicu

Arab Spring. Krisis juga telah memperlambat upaya untuk mengatasi ancaman mendesak terhadap keuangan publik, yang mengkhawatirkan para investor.

Seorang pengunjuk rasa, Nadia Ben Salem mengatakan kepada Reuters, dia telah melakukan perjalanan sejauh 500 km untuk ikut dalam aksi protes. Dia ingin mengekspresikan kemarahannya terhadap pemerintah melalui aksi protes tersebut.

"Kami akan melindungi demokrasi, konstitusi adalah garis merah," kata Salem sambil menunjukkan salinan konstitusi. Sementara, seorang guru

yang ikut dalam aksi protes Abdelfattah Saied, mengatakan, Presiden Saied bertindak seperti matahari yang terbit di negara ini. "Dia bertindak seperti jaksa agung, presiden, parlemen, pemerintah. Seperti dia adalah segalanya," ujarnya.

Anggota parlemen Iyadh Loumi dari partai Heart of Tunisia mengatakan. Presiden Saied ingin mengisolasi semua orang dan mengambil semua kekuasaan. Menurutnya, Saied harus dipecat dan diadili. Sementara itu, puluhan pendukung Saied muncul di tengah-tengah aksi demonstrasi. Polisi kemudian memisahkan kedua kubu untuk menghindari peningkatan eskalasi.

"Kami mendukung Saied karena dia menyatakan perang melawan kelas politik yang korup," kata pria yang hanya mau menyebutkan nama depannya, Ahmed. Analisis politik Slaheddine Jourchi mengatakan kepada Reuters bahwa, aksi protes tersebut merupakan eskalasi yang jelas terhadap presiden. Menurutnya, ada risiko perpecahan lebih lanjut di antara warga Tunisia jika pintu dialog politik tetap tertutup. Serikat pekerja berpengaruh Tunisia pada Jumat (24/9) memperingatkan ancaman terhadap demokrasi ketika oposisi terhadap Saied semakin meluas. Sementara pada Sabtu (25/9), lebih dari 100 pejabat terkemuka dari partai Ennahda, termasuk anggota parlemen dan mantan menteri, mengundurkan diri. Hal ini sebagai bentuk protes atas kin-

erja kepemimpinan. Ennahda, partai terbesar di parlemen, telah terpecah atas tanggapan terhadap tindakan Saied.

Ennahda adalah partai yang paling kuat di Tunisia sejak revolusi 2011 yang menyebabkan tergulingnya mantan Presiden Tunisia Ben Ali. Partai tersebut telah memainkan peran kunci dalam mendukung pemerintahan koalisi berturut-turut.

Ennahda adalah partai yang paling terorganisir dalam 217 kursi legislatif, dan sangat terfragmentasi. Tetapi sejak 2014 pangsa suara partai tersebut telah anjlok. Partai juga telah melihat keretakan internal dalam beberapa tahun terakhir. Anggota muda partai menuntut perubahan di puncak, termasuk mengganti pemimpin partai, Rached Ghannouchi. ● tom

Proyek Penjara Mesir dan Ironi Pelanggaran HAM

MESIR(IM) - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada 15 September 2021 lalu telah mengumumkan rencana untuk meresmikan kompleks penjara terbesar. Pengumuman itu diungkapkan dalam panggilan telepon dengan acara bincang-bincang "9:00" di Channel 1 milik negara.

Saat itu, Sisi mengatakan bahwa kompleks tersebut mencakup delapan penjara di Wadi El-Natrun, 100 km (62 mil) dari Kairo. Ia ingin membangun kompleks penjara dengan 'gaya Amerika'. Menurutnya, tahanan akan menjalani hukuman dengan cara yang manusiawi dalam hal pergerakan mereka, perawatan kesehatan dan kemanusiaan, budaya dan reformasi mereka.

Pengumuman tersebut dilakukan di tengah seruan terus-menerus pada pemerintahannya untuk membebaskan ribuan tahanan politik. Beberapa hari sebelum mengumumkan peresmian kompleks penjara terbesar di Mesir, El-Sisi meluncurkan strategi hak asasi manusia nasional pertama negara itu.

Pengumuman rencana penjara El-Sisi ini dinilai kontras dengan strategi HAM yang diluncurkannya. Dalam sebuah artikel di Middle East Eye, dilansir Senin (27/9), Rania al-Malky, mantan pemimpin redaksi Daily News Egypt (2006-2012), menyebut rencana penjara El-Sisi itu semakin menambah luka pada ribuan tahanan di penjara Mesir.

Menurutnya, ironi itu tidak hilang pada puluhan ribu tahanan politik Mesir dan keluarga mereka. Ia menyoroti acara ekstravaganza hak asasi manusia selama tiga jam yang dimulai dengan sebuah dokumenter.

Delapan menit fiksi dokumenter mengemas semuanya. Seorang perempuan Kristen menuntut kebebasan untuk menjalankan imannya, seorang gadis kecil menuntut pendidikan; seorang anak laki-laki meminta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Mereka bahkan menyelipkan seorang tahanan yang menuntut rehabilitasi saat dia dengan rajin melakukan pekerjaan sehari-harinya di fasilitas penahanan yang sempurna.

Dalam dokumenter itu, narator mencantumkan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sengaja dikurung dengan upaya tanpa henti militer untuk mengendalikan teroris jahat, kurikulum agama yang direvisi, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan peradilan, undang-undang yang melindungi anak-anak, kerukunan antaragama, dan perumahan yang terjangkau bagi pasangan muda yang bahagia. Namun demikian, narasi yang dikemas apik dalam dokumenter itu berbanding terbalik

dengan kenyataan. Dalam hal ini, Rania al-Malky menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir. Menurut catatan, lebih dari 630 situs web diblokir di Mesir, termasuk 118 outlet media berita dan 16 yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Al-Malky menyebutkan kondisi penjara Mesir yang terdokumentasi dengan baik, termasuk penyiksaan sistemik terhadap tahanan yang dimungkinkan oleh banyak kebijakan penahanan sewenang-wenang massal dan tanpa proses hukum. Di samping itu, ditemukannya kondisi yang kejam dan tidak manusiawi, mulai dari kurangnya akses ke air bersih dan makanan, hingga kurungan isolasi yang berkepanjangan, kemudian akses perawatan kesehatan yang terbatas dan bahkan penghentian pengobatan.

Menurut laporan 2020 oleh Jaringan LSM hak asasi manusia internasional Ifex, 917 tahanan meninggal di tempat-tempat penahanan di Mesir antara Juni 2013 dan November 2019, dengan peningkatan drastis pada 2019. Laporan tersebut mencatat bahwa 677 dari kematian itu disebabkan oleh kelainan medis, dan 136 karena penyiksaan.

Sebuah panel independen ahli Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dilaporkan menggambarkan jatuhnya pendapat hingga berakhir kematian dari presiden Mesir yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, di pengadilan pada 2019 sebagai bentuk potensial dari pembunuhan sewenang-wenang yang disetujui negara.

Morsi ditahan tanpa komunikasi selama berminggu-minggu setelah pemecatannya dalam kudeta militer yang dipimpin oleh panglima militer saat itu Sisi pada 3 Juli 2013, setahun setelah masa jabatannya. Seorang pelapor khusus PBB menggambarkan penolakan perawatan kesehatan untuk Morsi, yang menderit diabetes dan hipertensi, sebagai sesuatu yang disengaja.

Menurut al-Malky, kematian Morsi ini adalah gejala dari kelainan yang disengaja yang diderita oleh sekitar 60.000 tahanan politik di Mesir. Menurut laporan April 2021 oleh Jaringan Informasi Hak Asasi Manusia Arab, sejak revolusi 2011, jumlah penjara di negara itu melonjak menjadi 78, naik dari 43.

Karena itu, al-Malky memandang betapa ironisnya ketika Sisi ingin model fasilitas Mesir yang baru dan lebih baik pada sistem yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia secara implisit dan eksplisit, bentuk perbudakan modern dan penahanan massal yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, sistem peradilan pidana di negara itu berlawanan dari memprioritaskan hak asasi manusia di atas keuntungan politik dan uang. ● gul

Swiss Sahkan Pernikahan Sesama Jenis

BERN(IM) - Masyarakat Swiss mendukung pernikahan sesama jenis dalam referendum pada Senin (27/9). "Pernikahan Untuk Semua" diadakan dengan 64,1 persen suara mendukung, menurut kantor Federal untuk Statistik Swiss. Tidak ada satu pun dari 26 kanton Swiss yang memberikan suara menentangnya.

Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter mengatakan pemerintah federal menyambut baik keputusan ini. Menurutnya negara seharusnya tidak mendikte bagaimana orang harus mengatur kehidupan pribadi mereka.

"Dewan Federal akan segera melaksanakan kehendak rakyat. Menurut perencanaan saat ini, ketentuan baru dapat mulai berlaku pada 1 Juli 2022. Pasangan sesama jenis mungkin akan dapat menikah di Swiss mulai saat ini," ujar Keller-Sutter dilansir Euronews, Senin (27/9).

Dia juga mencatat pasangan wanita yang sudah menikah ha-

rus dapat memanfaatkan donasi sperma yang diatur secara hukum. Hasilnya sebagian besar sejalan dengan jajak pendapat yang dirilis menjelang pemungutan suara, yang menunjukkan bahwa 63 persen pemilih di negara Alpine yang kaya tersebut mengatakan 'ya' untuk reformasi kebijakan ini.

Swiss adalah salah satu negara Eropa Barat terakhir yang masih melarangnya. Pernikahan sesama jenis pertama kali disetujui di Eropa di Belanda 20 tahun lalu.

Dua puluh tahun sejak pernikahan gay pertama, perjuangan untuk hak-hak di Eropa terus berlanjut. Akan tetapi kampanye di Swiss, yang mengadu aktivis LGBT melawan lawan konservatif, sangat terpolarisasi.

"Ketika Anda difavoritkan untuk menang, bahayanya adalah orang-orang yang mendukung reformasi mengalami demobilisasi dan tiba-tiba, kubu lawanlah yang menang. Orang-orang dengan hak pilih menggunakannya," kata Olga

Baranova, yang mengelola kampanye "Pernikahan Untuk Semua".

Berbicara sebelum referendum, Thierry Delessert, seorang sejarawan di University of Lausanne yang mengkhususkan diri dalam masalah LGBT di Swiss, mengatakan suara 'ya' akan menjadi signifikansi besar. "Hingga awal 2020-an, yang mendominasi adalah wacana kesetaraan yang dibedakan," kata pakar itu.

"Namun pernikahan berarti kesetaraan penuh. Orang-orang LGBT diakui sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lain, tidak hanya setara dengan hak yang lebih sedikit atau hak tertentu," tambahnya.

Akan tetapi para penentang khawatir tindakan itu dapat mengikis nilai-nilai keluarga tradisional. "Pernikahan dan keluarga terkait erat karena anak-anak lahir secara alami hanya dari penyatuan seorang pria dan seorang wanita," kata komite antarpantai "Tidak' untuk pernikahan bagi semua," tegasnya. ● ans

Sekjen PBB Serukan Pemusnahan Senjata Nuklir

NEW YORK(IM) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang berbicara pada Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir, menyatakan senjata nuklir harus dihapuskan dari dunia dan era baru dialog, harapan dan perdamaian harus dimulai.

Mengatasi ancaman senjata nuklir "sudah menjadi tugas utama PBB sejak awal," kata pejabat

tertinggi PBB itu.

"Pada 1946, resolusi Majelis Umum pertama mengupayakan 'penghapusan persenjataan nasional senjata atom dan semua senjata utama lainnya yang dapat disesuaikan dengan pemusnahan massal'" ungkap sekjen.

Pimpinan PBB menunjukkan bahwa meski secara keseluruhan jumlah senjata nuklir menurun selama beberapa dekade, tetapi

sekitar 14.000 senjata di seluruh dunia masih ditimbun. Kondisi itu membuat dunia menghadapi "tingkat risiko nuklir paling tinggi," dalam hampir empat dekade. "Kini saatnya untuk mengusir ancaman ini selamanya, melenyapkan senjata nuklir dari dunia kita dan mengantarkan era baru dialog, harapan dan perdamaian bagi semua orang," kata Guterres. ● tom



MALTA INTERNATIONAL AIRSHOW

Tim pertunjukan Red Arrows dari Angkatan Udara British Royal tampil dalam Malta International Airshow di lepas pantai Qawra, Malta, Minggu (26/9).

Menyamar Jadi Pengacara, Pria Bersenjata Tembak Mati Bos Mafia di Ruang Sidang Pengadilan India

NEW DELHI(IM) - Seorang bos mafia tewas setelah beberapa orang bersenjata dari geng lawan menyerbu masuk ruang sidang tempatnya diadili dan melepaskan tembakan. Orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pengacara itu kemudian ditembak polisi dan tewas karena luka-luka mereka.

Pada Jumat (24/9), Jitender Gogi, seorang gangster terkenal yang telah dipenjara sejak 2020, dibawa ke sidang di utara Delhi, India. Pada saat kedatangannya, orang-orang bersenjata dari kelompok saingan, geng Tillu, memasuki ruang sidang dengan berpakaian seperti pengacara dan menembaki Gogi. Bos mafia itu dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Personel pasukan khusus yang mengawal Gogi membalas tembakan dua pria bersenjata itu, membunuh mereka di tempat, demikian diwartakan RT.

"Dua dari geng saingan menembaki Jitender Gogi di dalam pengadilan. Saat itulah polisi membalas dan membunuh dua penyerang," kata Komisaris Polisi Del-

hi Rakesh Asthana kepada NDTV, membenarkan bahwa orang ketiga juga tewas dalam baku tembak tersebut.

Laporan awal menyebutkan empat orang tewas. Laporan bervariasi, tetapi diketahui bahwa setidaknya enam orang lainnya, termasuk seorang pengacara wanita, terluka.

Video dari lobi di luar ruang sidang saat penembakan telah banyak dibagikan di media sosial. Suara tembakan terdengar dari dalam ruang sidang dan seorang petugas berdiri di pintu sambil mengarahkan senjatanya ke dalam ruangan.

Video lain yang beredar tampaknya menunjukkan seorang korban diangkat ke ambulans.

Media India mengklaim geng Gogi dan geng Tillu telah berperang selama bertahun-tahun, dan perseteruan mereka telah menewaskan setidaknya 25 orang. Gogi, yang memiliki nama asli, Jitender Mann, ditangkap tahun lalu.

Penembakan Jumat telah menimbulkan pertanyaan tentang protokol keamanan di pengadilan India. ● gul

Malaysia Tangkap Pria WNI Pemilik 2 Karung Goni Sabu

IPOH (IM) - Polisi Perak, Malaysia, menangkap seorang pria Indonesia berusia 56 tahun dengan dua karung goni berisi sabu-sabu. Narkoba senilai RM1,7 juta atau lebih dari Rp5,7 miliar itu hendak "diekspor" ke Indonesia.

Pria tersebut ditangkap polisi pada hari Minggu pukul 12.55 waktu setempat di pinggir jalan dekat dermaga ilegal di daerah Bagan Lipas Laut di Rungkup dekat Bagan Datuk.

Kepala Polisi Perak, Mior Faridalthrash Wahid, mengatakan departemen investigasi kriminal narkotika polisi Hilir Perak menangkap pria dengan narkoba seberat 29kg.

"Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa tersangka membeli narkoba dari distributor lokal, dan kemudian akan 'mengeksport' narkoba melalui perahu di dermaga ilegal," katanya, seperti dikutip The Star, Senin (27/9).

"Akan ada lagi kapal 'pick-up' di tengah laut tempat barang-barang itu akan

dikumpulkan dan dibawa ke Indonesia," katanya dalam konferensi pers di markas polisi Perak.

Komisaris Mior Faridalthrash menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya polisi negara bagian setempat menemukan modus operandi seperti ini dalam penyelundupan narkoba.

Dia mengatakan tersangka memiliki dokumen yang sah untuk tinggal di Malaysia, dan dia telah berada di negara itu selama lebih dari setahun.

"Kami percaya bahwa dia telah aktif 'mengeksport' narkoba selama tiga bulan terakhir," ujarnya.

"Tes urine untuk narkoba yang dilakukan padanya negatif, dan tersangka juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya," imbuh dia tanpa merincikan identitas tersangka.

Dia mengatakan narkoba yang disita dapat didistribusikan ke sekitar 300.000 pengguna, dan tersangka akan ditahan hingga 2 Oktober mendatang. ● ans



TUR THE ROLLING STONES

Mick Jagger, Keith Richards dan Ronnie Wood dari The Rolling Stones memulai tur Amerika Serikat, sebulan setelah kematian pemain drum Charlie Watts, di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, Minggu (26/9).

Sydney akan Terbitkan Buku Panduan Pelonggaran Aturan Covid

SYDNEY(IM) - Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) akan mengeluarkan buku panduan pada Senin (27/9) untuk membuka kembali aktivitas perekonomian.

Buku panduan tersebut akan menjelaskan berbagai tingkat kebebasan yang diberikan kepada warga negara berdasarkan status vaksinasi mereka. Dengan 60 persen orang berusia 16 tahun ke atas yang diinokulasi penuh - di atas rata-rata nasional 52 persen - para pejabat berharap untuk mencapai target sebanyak 80 persen sekitar akhir Oktober, berdasarkan tingkat vaksinasi saat ini.

"Anda akan terkejut dengan apa yang akan diumumkan," kata Wakil Pemimpin Negara Bagian New South Wales John Barilaro kepada radio 2GB. "Jika Anda menginginkan kebebasan yang sedang kita bicarakan, Anda

harus divaksinasi." Negara bagian New South Wales mulai melonggarkan beberapa pembatasan pada Senin, termasuk di ibu kota Sydney. Kegiatan konstruksi dapat kembali beroperasi dalam kapasitas penuh. Kolam renang dibuka kembali dengan langkah-langkah menjaga jarak. Pihak berwenang pada Minggu berjanji bahwa perjalanan di dalam negara bagian akan diizinkan ketika ambang batas 80 persen tercapai.

Australia berada dalam cengkeraman gelombang infeksi ketiga, dipicu oleh varian Delta yang lebih menular. Varian Delta membuat Sydney, Melbourne, Canberra dan kota-kota besar dikarantina (lockdown). Skema pembatasan kembali nasional pemerintah federal didasarkan pada Australia yang mencapai tingkat vaksinasi 70-80 persen untuk populasi orang dewasanya. ● gul